

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA
MODAL DENGAN LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA DI SULAWESI SELATAN**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas**

Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

A. Firman Hasnur
NIM. 10800112039

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Firman Hasnur
NIM : 10800112039
Tempat/Tgl. Lahir : Soppeng, 28 Mei 1994
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jln. Datuk Paggentungan, Gria Alam Lestari C3 no 3
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Desember 2016

Penyusun

A. Firman Hasnur
10800112039

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan”**, yang disusun oleh **A. Firman Hasnur**, NIM : 10800112039, mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2016, bertepatan dengan 22 Shafar 1438 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Makassar, 6 Desember 2016

6 Rabiul Awwal 1438 H


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Jamaluddin M., SE., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Memen Suwandi SE., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Syaharuddin, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah (Subhanahu Wata'ala) yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan inahnya serta ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam “Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Waaala Ali Sayyidina Muhammad” juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Hasanuddin dan ibunda Nurpatisah yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya

untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara. M.Ag selaku penguji I yang bersedia menguji dan memperbaiki penelitian ini.
4. Bapak Jamaluddin Majid, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sekaligus selaku penguji II yang bersedia menguji dan memperbaiki penelitian ini.
5. Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sekaligus sebagai Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syaharuddin, M.Si, sebagai dosen pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Seluruh staf akademik, dan tata usaha serta staf jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
9. Semua keluarga tercinta, A.Sida, A. Naharia, A.Oddang, A. Innong, A. Imail, Nene Ame' Ganti Brother , Andi Alfian Fadillah Murdani, Andi Fandi , A. Darwis, A. Murni, A.Saharuddin, Pung Adi, Pung Seri, Tante Ami, Ta Tani, Pung Emmi, Pung Jus, Pung Edda, Pung Eppi, A. Reski Dan Pung Nenek Arrah dan keluarga yang lain yang selalu mendukung saya.
10. Kepada Senior ku sudah anggap saudara Hasdini Muhiddin yang telah banyak membantu baik secara materil maupun bantuan secara moril sehingga skripsi ini bisa terselesaikan,
11. Serta sahabatku di kampus Alfian hamid dan Fadlan Maula yang memberikan semangat dan bantuan setiap menemui kesulitan.
12. Teman Seperjuangan Pengurusan Skripsi dan senior yang senang tiasa membantu Hasma, Rama, Fitri, Jum, Firda, Muryadi, Ainun, Lina, Affa , Uki, mirna, Ardi, Kak ardi dan Istri, Kak Fitra , Kak Alfath, Kak Ade, dll
13. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi khususnya AK 3.4 Dan A.K 1.2 angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini dan atas kebersamaannya selama kuliah serta seluruh Akuntansi angkatan 2012 serta adek-adek junior angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016.

14. Seluruh Member Ten4 (U.K Crew) dan DBM yang selalu mendukung ,
UNE1, U.K Crew Boys, U.K Crew Girls, U.K Crew Unik, Terutama Buat
Kanjeng lider Dedy Jusfari Jufri, Dirsya, Pute, Hajar, Adit, Ilhu, Bayu, Ryan,
Ilho, Rhaflin, Ade, Rey, Sull, Aal, Amma, Nanna, Dyah, Nisa, Kak Kiki, Kak
Ken, Dian, Ekki, Sendra, Aska, Kak Erwi, Kak Gobang, Ryan DB, Kak Aser,
Hani, Kak Dian, Fuse, Doo Kyung Soo.
15. Seluruh keluarga besar Cita Alam Lestari, Fian, Fandi, Anca, Anci, Kasim,
Salim, Kak Bangkit, Kak Nawir, Wulan, Nuke, Maulidina, Kak Ammar, Arif.
16. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-
persatu yang turut memberikan bantuan dan pengertian secara tulus dan terima
kasih atas doa dan sarannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam
penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat
diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Samata-Gowa, Desember 2016

A. FIRMAN HASNUR
NIM. 10800112039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Hipotesis	7
D. Variabel Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Keagenan.....	21
B. <i>Stakeholder theory</i>	24
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
D. Dana Perimbangan	33
E. Belanja Modal	42
F. Luas Wilayah	45
G. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50

E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	50
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B. Analisis Hasil Penelitian	71
C. Pembahasan.....	84
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Ketentuan Nilai <i>Durbin-Watson</i>	54
Tabel 4.1 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Selayar	59
Tabel 4.2 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Bantaeng	60
Tabel 4.3 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Bulukumba.....	60
Tabel 4.4 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto	61
Tabel 4.5 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Takalar	61
Tabel 4.6 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Gowa.....	62
Tabel 4.7 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Sinjai	62
Tabel 4.8 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Maros	63
Tabel 4.9 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Pangkep.....	63
Tabel 4.10 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Barru	64
Tabel 4.11 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Bone	64
Tabel 4.12 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Soppeng	65
Tabel 4.13 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Wajo.....	65
Tabel 4.14 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Sidrap	66
Tabel 4.15 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Pinrang	66
Tabel 4.16 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Enrekang	67
Tabel 4.17 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Luwu	67
Tabel 4.18 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Tanah Toraja	68
Tabel 4.19 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Luwu Utara	68
Tabel 4.20 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Luwu Timur	69

Tabel 4.21 APBD dan Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara	69
Tabel 4.22 APBD dan Luas Wilayah Kota Makassar.....	70
Tabe 4.23 APBD dan Luas Wilayah Koa Parepare	70
Tabel 4.24 APBD dan Luas Wilayah Kota Palopo.....	71
Tabel 4.25 <i>Descriptive Statistics</i>	71
Tabel 4.26 <i>One-Sample Kolmogrov-Simirnov Test</i>	74
Tabel 4.27 <i>Coefficients^a</i> Multikolineritas	76
Tabel 4.28 Ketentuan Nilai <i>Durbin-Watson</i>	78
Tabel 4.29 <i>Model Summary^b</i>	78
Tabel 4.30 <i>Coefficients^a</i>	79
Tabel 4.31 <i>Model Summary</i>	80
Tabel 4.32 Anova ^a	81
Tabel 4.33 <i>Coefficients^a</i> Regresi Linier Berganda	82
Tabel 4.34 <i>Coefficients^a</i> Uji Nilai Selisih Mutlak.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambaran Kerangka Pikir.....	47
Gambar 4.1 Histogram.....	73
Gambar 4.2 <i>Normal P-plot of Regression Standardized Residual</i>	74
Gambar 4.3 <i>Scatter Plot</i>	77



ABSTRAK

Nama : A. Firman Hasnur

Nim : 1080011039

Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja modal dan pengaruh Luas Wilayah sebagai variabel moderating untuk pendapatan daerah dari ke empat variabel terhadap pengalokasian belanja modal. Belanja modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan public dan *good governance*.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan sebanyak 24 Kabupaten/Kota dari tahun 2012-2015, sampel dalam penelitian ini adalah populasi tersebut dengan alasan ketersediaan data, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan untuk analisis variabel moderating menggunakan uji nilai selisih mutlak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi belanja modal dan Luas Wilayah mampu memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak signifikan dengan arah yang negatif terhadap alokasi belanja modal

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Luas Wilayah, Belanja Modal*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian terakhir direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Dengan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membiayai seluruh belanja-belanja daerah berdasarkan azas kepatuhan, kebutuhan dan juga kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah otonom, peningkatan jumlah dan kualitas layanan umum dan adanya daya saing daerah yang cukup kuat.

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas

anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim dalam Arwati dan Hadiati 2013:498).

Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jaya dan Dwirandra, 2014:80). Perkembangan pelaksanaan otonomi atau desentralisasi memberikan kesempatan bagi kabupaten untuk memperluas potensi (Irwan, 2011: 122). Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya yang dianggarkan dalam APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Sulistyowati, 2011:2).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif supaya tidak terjadi pemborosan anggaran, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al Israa/17 : 26-27 yang berbunyi :

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٦٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Maksud dari ayat di atas hendaknya pemerintah membelanjakan pendapatannya untuk belanja yang bersifat produktif untuk pelayanan kepada masyarakat dengan prioritas anggaran ke belanja-belanja yang dimanfaatkan dan di pergunakan langsung oleh masyarakat seperti Belanja Modal, karena perbuatan boros merupakan saudara saitan yang sangat ingkar kepada Allah SWT, tetapi selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada Belanja Modal (Mamonto dkk, 2014:3). Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor Belanja Modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik daripada belanja oprasi, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik yang dapat dilakukan dengan pengalokasian Belanja Modal. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 belanja oprasi dialokasikan sebesar Rp.19.711.903.972.000 sedangkan Belanja Modalnya sangat jauh berbeda hanya sebesar Rp. 5.586.216.013.000 (BPS Sulawesi Selatan).

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran Belanja Modal sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun masalah lain yang dihadapi yaitu adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi Belanja Modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Wandira, 2013:2). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran Belanja Modal dengan baik karena Belanja Modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Luas Wilayah .

Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini peneliti membatasi objek penelitian dengan hanya melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saja. Hal ini dikarenakan 2 komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga kedua komponen tersebut diharapkan telah mewakili komponen Pendapatan Asli Daerah (Sianturi, 2010). Di Sulawesi Selatan, pajak dan retribusi pada tahun 2015 belum mampu membiayai Belanja Modalnya, dimana pajak sebesar Rp. 1.360.296.898.000 dan

retribusi sebesar Rp. 618.428.579.000 sedangkan Belanja Modalnya sebesar Rp. 5.586.216.013.000 (BPS Sulawesi Selatan) .

Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan adanya pengalokasian DAU dan DAK diharapkan dapat mempengaruhi Belanja Modal, karena cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah Luas Wilayah, sehingga mampu mempengaruhi pengalokasian pajak, retribusi, DAU dan DAK yang keempatnya merupakan pendapatan daerah terbesar untuk dialokasikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan uraian diatas maka, dilakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD dan pelaksanaannya lebih banyak mengalokasikan anggaran ke sektor belanja operasi dari pada Belanja Modal. Padahal Belanja Modal merupakan pengeluaran Pemerintah yang sangat efektif untuk meningkatkan pelayanan umum, dan masalah lain yang di hadapai pemerintah yaitu adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi Belanja Modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Untuk meningkatkan pengalokasian anggaran ke sektor Belanja Modal diperlukan pengetahuan mengenai komponen-komponen pendapatan apa saja yang berpengaruh positif untuk dialokasikan ke Belanja Modal. Dari sektor PAD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Dari sektor dana perimbangan, yang berpotensi berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah Luas Wilayah sehingga dijadikan sebagai variabel moderating untuk pendapatan daerah dari pajak,

retribusi, DAU dan DAK yang akan di alokasikan untuk belanja modal. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal?
5. Apakah pajak, retribusi, DAU dan DAK berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pengalokasian Belanja Modal ?
6. Apakah Luas Wilayah dapat memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, DAU dan DAK terhadap pengalokasian Belanja Modal ?

C. *Hipotesis*

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap pengalokasi Belanja Modal Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk Belanja Modal.

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Dalam penelitian (Sianturi, 2010) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal, ini berarti semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pengalokasian pada Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap penaglokasi Belanja Modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor Retribusi Daerah. Jika Retribusi Daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian (Sulistiyowati, 2011:24) menyatakan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, sehingga

apabila terjadi kenaikan pada Retribusi Daerah, maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.

3. Pengaruh DAU terhadap penaglokasi Belanja Modal

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan berupa DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan dalam bentuk Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan (Sulistyowati, 2011: 24) menyimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

alokasi Belanja Modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada DAU, maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal, Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal

4. Pengaruh DAK terhadap penaglokasi Belanja Modal

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33 tahun 2004).

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Modal. Dalam penelitian (Wandira, 2013:96)

menyatakan Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal

5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal.

Pajak daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK semuanya merupakan pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah, salah satunya adalah Belanja Modal yang sangat berguna untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga menghasilkan hipotesis untuk pengujian secara bersama-sama atau simulta sebagai berikut :

H5 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK berpengaruh signifikan secara simultan terhadap alokasi Belanja Modal

6. Pengaruh Luas Wilayah terhadap hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK dengan Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah Luas Wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang

tidak begitu luas sehingga Luas Wilayah mampu memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, DAU dan DAK untuk pengalokasian Belanja Modal.

Luas Wilayah suatu daerah dapat dijadikan ukuran suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan terutama berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jaringan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan akan mempermudah akses ke suatu daerah dan dapat memperlancar transportasi sehingga dapat memperlancar arus barang dari daerah satu ke daerah yang lain. Lancarnya arus barang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Dan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri. Penelitian yang dilakukan (Kusnandar dan Dodik, 2012:16) menyatakan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi Belanja Modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Luas Wilayah dapat memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal

D. Variabel Penelitian

Pengujian hipotesis, perlu diteliti variabel-variabel dengan penentuan indikator-indikator yang digunakan. Variabel adalah suatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Kuncoro,

2013:49). Adapun variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Variasi dalam variabel dependen merupakan hasil dari variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah :

- a. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah, adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam (UU No. 28 Tahun 2009) disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU no.33 tahun 2004).

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004)

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat memprediksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel dependen beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah :

- a. Belanja Modal, Belanja Modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan (Sianturi, 2010).

3. Variabel Moderating

Variabel yang fungsinya mempengaruhi hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengaruh itu dapat memperkuat dan atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah :

- a. Luas Wilayah, Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai,

gunung, atau laut. Luas Wilayah Pemerintahan merupakan jumlah ukuran dari besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota maupun provinsi. Luas Wilayah sangat erat kaitannya dengan geografis suatu daerah (Yusin, 2015).

E. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan (Sianturi, 2010) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal, sementara Retribusi Daerah mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap Belanja Modal, ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Mamonto, Kalangi dan Krest, 2014:13) yang menyatakan secara parsial variabel Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal dan penelitian yang dilakukan (Sulistiyowati, 2011:24) yang menyatakan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada Retribusi Daerah, maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan (Sulistiyowati, 2011:24) mengenai DAU menyimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada DAU, maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Arwati dan Hadiati, 2013:506) yang menyimpulkan

bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Penelitian mengenai DAK yang dilakukan (Wandira, 2013:96) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal, sedangkan dalam penelitian (Handayani dan Elva, 2012:11) menyatakan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah, karena kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan (Kusnandar dan Dodik, 2012:16) menyatakan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi Belanja Modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri ini dikarenakan salah satu pertimbangan pemerintah dalam dalam pengalokasian terhadap Belanja Modal adalah Luas Wilayah.

Tabel 1.1

Tebel Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Mamonto, Kalangi dan Krest (2014)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel independen: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah	Secara parsial variabel Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, kemudian variabel Retribusi Daerah juga tidak memiliki pengaruh

			terhadap belanja modal.
2	Sulistyowati (2011)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel independen: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. DAU d. DAK	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.
3	Arwati dan Hadiati (2013)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel independen: a. Pertumbuhan Ekonomi b. PAD c. DAU	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

4	Kusnandar dan Dodik (2012)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel independen: a. DAU b. PAD c. SiLPA d. Luas Wilayah	Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
5	Wandira (2013)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel independen: a. PAD b. DAU c. DAK d. DBH	secara parsial variabel DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
6	Handayani dan Elva (2012)	Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel independen: a. Pajak Daerah b. DAK	Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah
7	Sianturi (2010)	Variabel dependen: Belanja Modal Variabel independen:	Pejak daerah berpengaruh signifikan positif sedangkan Retribusi

		a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah	Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan.
--	--	--	---

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

- a. Pengaruh Pajak Daerah terhadap alokasi Belanja Modal
- b. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap alokasi Belanja Modal
- c. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Modal
- d. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal
- e. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal.
- f. Pengaruh Luas Wilayah terhadap hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK dengan Belanja Modal

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah dan sebagai bahan pertimbangan untuk pengalokasian Belanja Modal, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.
- 2) Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Teori Keagenan*

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976:5). Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal.

Menurut (Andvig et al dalam Halim dan Syukriy, 2006:3) model *principal-agent* merupakan rerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingannya yang sifatnya lebih sempit dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah. Jadi

tujuan prinsipal harus mengiringi tujuan untuk mengembangkan suatu daerah dan untuk membuat rakyatnya sejahtera.

Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal (Wandira, 2013:9). Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*nya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Makanya pihak agen dan prinsipal harus saling mendukung dan berlaku adil atas keputusannya dalam penganggaran karena ini akan berimplikasi terhadap masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-nisa/4 : 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Maksudnya legislatif harus menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya yaitu eksekutif dan keduanya harus menetapkan hukum dengan adil hukum dalam artian disini adalah penetapan anggarannya yang harus adil yang

tidak mementingkan legislatif maupun eksekutif saja seperti masalah dalam penelitian ini yang menyatakan bisa saja legislatif bertindak hanya mementingkan keinginannya sendiri karena memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada eksekutif. Legislatif harus bekerjasama dengan baik dengan eksekutif dan berlaku adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, salah satunya dengan merealisasikan pendaptannya untuk belanja modal yang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Karena Allah sudah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada manusia.

Teori keagenan dalam sektor publik merupakan sistem keagenan yang bertingkat. Bertingkat yang dimaksudkan disini adalah karena hubungan keagenan dalam pemerintahan terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Eksekutif

Perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. APBD tersebut yang akan menjadi alat kontrol bagi DPRD untuk memantau kinerja Pemda.

2. Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik

Pemberian pelayanan kepada publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik (rakyat) bertindak sebagai prinsipal. Legislatif merupakan perwakilan dari rakyat yang dipercaya untuk dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya. Legislatif bertindak berdasarkan keinginan rakyat dan rakyat memantau kinerja dari legislatif. Jadi walaupun di satu sisi legislatif menjadi prinsipal, tapi dalam hubungannya dengan publik, legislatif bertindak sebagai agen. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, kemudian melakukan pendelegasian tugas kepada eksekutif untuk melakukan penganggaran (Nugroho, 2012: 41-42).

Hagen Von, (2002) dalam hal pembuatan kebijakan, berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

B. *Stakeholder theory*

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Pengaruh dari *stakeholder theory* dapat dirujuk ke tahun

1984, ketika R.E. Freeman mempublikasikan sebuah buku berjudul '*Strategic Management: A Stakeholder Approach*'. Dalam buku tersebut, Freeman menyatakan bahwa korporasi harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dan permintaan-permintaan, bukan hanya dari para *shareholders*-nya melainkan juga dari konstituen-konstituen eksternal lain dalam artian luas, yakni *stakeholders* (Clement, 2005). Freeman mendefinisikan *stakeholders* sebagai: "*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives*" (Kolk & Pinkse, 2006) bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.

Stakeholder theory merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Putro, 2013). Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Putro, 2013). Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, salah satu caranya dengan mengalokasikan Pendapatan Daerahnya untuk belanja modal yang langsung di manfaatkan dan dipergunakan secara langsung oleh masyarakat sebagai *stakeholder*. Jika pendapatannya seperti Pajak, Retribusi

DAU dan DAK dialokasikan ke Belanja Modal maka akan memberikan efek kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai *shareholders*.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah (Sukmawati, Wayan dan Fridayana, 2016:4). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan atau dengan sebutan lain di luar yang ditetapkan undang-undang (Reyowijoyo, 2010:173). Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah /BUMD, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan /atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan (Arbincan,2012).

Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Seperti dalam penelitian yang dilakukan (Setiawan, 2010:6) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah. Kebutuhan masyarakat yang meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Puspitasari, Made dan Ni Luh, 2015:2). PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD

berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah pusat.

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).

Menurut (Hasbiullah, 2015:139) pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Diana dan Lilis, 2010:1).

Pajak Daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Dari pengertian Pajak Daerah tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa pemungutan Pajak Daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri. Beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak yaitu ;

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kab/ Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kab/ Kota yang bersangkutan.
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan atau obyek pajak Pusat.
- 5) Potensinya memadai serta tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

b. Jenis-jenis pajak daerah

Jenis Pajak Daerah menurut (Halim dan Muhammad, 2011:101) terbagi 2 yaitu :

1) Pajak Propinsi

Jenis – jenis pajak Propinsi antara lain terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Pajak kendraan di air
- c) Bea balik nama kendaraan bermotor
- d) Bea balik nama kendaraan di air
- e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

f) Pajak air permukaan

g) Pajak rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota

Jenis – Jenis Pajak Kabupaten/Kota antara lain terdiri dari :

a) Pajak hotel

b) Pajak restoran

c) Pajak hiburan

d) Pajak reklame

e) Pajak penerangan jalan

f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

g) Pajak lingkungan

h) Pajak mineral bukan logam dan batuan

i) Pajak parkir

j) Pajak sarang burung walet

k) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

l) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam (UU No. 28 Tahun 2009) disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut (Halim dan Muhammad, 2011:102) Retribusi Daerah dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Retribusi jasa umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- 2) Retribusi jasa usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 3) Retribusi Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Masing-masing jenis retribusi tersebut memiliki kriteria yang berbeda menurut (UU No. 28 Tahun 2009) yaitu ;

c. Kriteria Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;

- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3) Pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- 4) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- 7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

d. Kriteria Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- 2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

e. Kriteria Retribusi Perijinan Tertentu

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;

- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

D. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, defferensial potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasadisebut fiscal gap (celah fiskal). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33 tahun 2004). Menurut (Halim, 2002 dalam Indraningrum, 2011:41) menjelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Pemerintah pusat dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

mengalokasikan sejumlah dana dari anggaran pendapatan belanja negara APBN sebagai dana perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan menurut (Widjaja, 2002 dalam Indraningrum, 2011:43), “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat baik.” Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dan dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi.

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pengertian DAU

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU no.33 tahun 2004). Menurut (Nordiawan dan Ayunigtiayas, 2010:26) DAU adalah dana yang bertujuan bagi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi

daerah. Menurut (Reyowijoyo, 2010:174) DAU adalah dana yang di alokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang di tetapkan dalam APBN yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang di tetapkan sesuai Undang-undang .

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. (Halim, 2009 dalam Wandira, 2013:30) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut.

Bagi daerah yang tingkat kemiskinanya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan

DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (Wandira, 2013:30).

Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, dilain pihak juga menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (Setiawan, 2010:42), ini membuktikan kurangnya pengalokasian terhadap belanja modal dimana belanja modal adalah yang dilihat dan dimanfaatkan masyarakat secara langsung. Beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif, dan untuk meningkatkan keberterimaan Pajak Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU memiliki tujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

b. Perhitungan DAU

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009 dalam Wandira, 2013:31) :

- 1) DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) DAU untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
- 3) DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 4) Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Penelitian yang dilakukan (Sulistyowati, 2011:24) menyimpulkan Dana Alokasi Umum (DAU) daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja

modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada DAU, maka akan meningkatkan alokasi belanja modal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Arwati dan Hadiati, 2013:506) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Pengertian DAK

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). Menurut (Nordiawan dan Ayunigtiayas, 2010:26) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan

kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Menurut (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004), wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistyowati, 2011:26).

Menurut (Reyowijoyo, 2010:174) DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk :

- 1) Mendanai kegiatan khusus yang di tentuka pemerintah atas dasar proritas nasional;
- 2) Mendanai kegitan khusus yang di usulkan daerah tertentu;

b. Mekanisme Pengalokasian DAK

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan, mekanisme pengalokasian DAK adalah sebagai berikut :

- 1) Kriteria Pengalokasian DAK
 - a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
 - b) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
 - c) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
- 2) Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 - a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
 - b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
- 3) Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

- 4) Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- 5) Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Dalam penelitian (Wandira, 2013:96) menyatakan Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal sedangkan dalam penelitian (Handayani dan Elva, 2012:11) menyatakan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah, karena kebutuhan sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

E. *Belanja Modal*

1. Pengertian Belanja Modal

Menurut PP No 71 Tahun 2010, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberimanfaat lebih

dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Menurut (Sianturi, 2010) Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Menurut (Halim dan Muhammad, 2011:107) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya (Wertiant dan Dwirandra, 2013:573).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Yovita, 2011:28). Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi.

Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Dengan tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja dan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah.

2. Klasifikasi Belanja Modal

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu:

- a. Belanja Modal Tanah, adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai,
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pernggantian/ dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai,
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas gedung sampai gedung sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai,
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan

pembangunan / pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisinya dipakai,

- e. Belanja Modal Fisik Lainnya, adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian / peningkatan/ pembangunan/ pembuatan/ serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barangpurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

F. Luas Wilayah

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas Wilayah Pemerintahan merupakan jumlah ukuran dari besarnya wilayah dari suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota maupun provinsi. Luas Wilayah sangat erat kaitannya dengan geografis suatu daerah (Yusin, 2015)

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan

prasarana adalah Luas Wilayah, maksudnya semakin besar Luas Wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Penelitian yang dilakukan (Kusnandar dan Dodik, 2012:16) menyatakan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri.

Dikaitkan dengan pemekaran daerah maka Luas Wilayah kemungkinan erat kaitannya dengan penganggaran belanja modal. Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tentunya berupaya membangun daerahnya dengan berbagai fasilitas layanan publik yang lebih layak terutama di wilayah-wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan publik seperti Rumah Sakit/Puskesmas, Gedung Sekolah, pembuatan tower telekomunikasi, pembangunan pasar-pasar tempat berdagang, pembukaan jalur perhubungan berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas masyarakat terutama dari wilayah-wilayah yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya. Jadi semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan.

G. *Kearangka Pikir*

Belanja daerah yang seringkali lebih diperhatikan adalah pengalokasian terhadap belanja operasi. Padahal untuk pengalokasian belanja modal merupakan hal yang penting karena belanja modal pemerintah daerah difokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik.

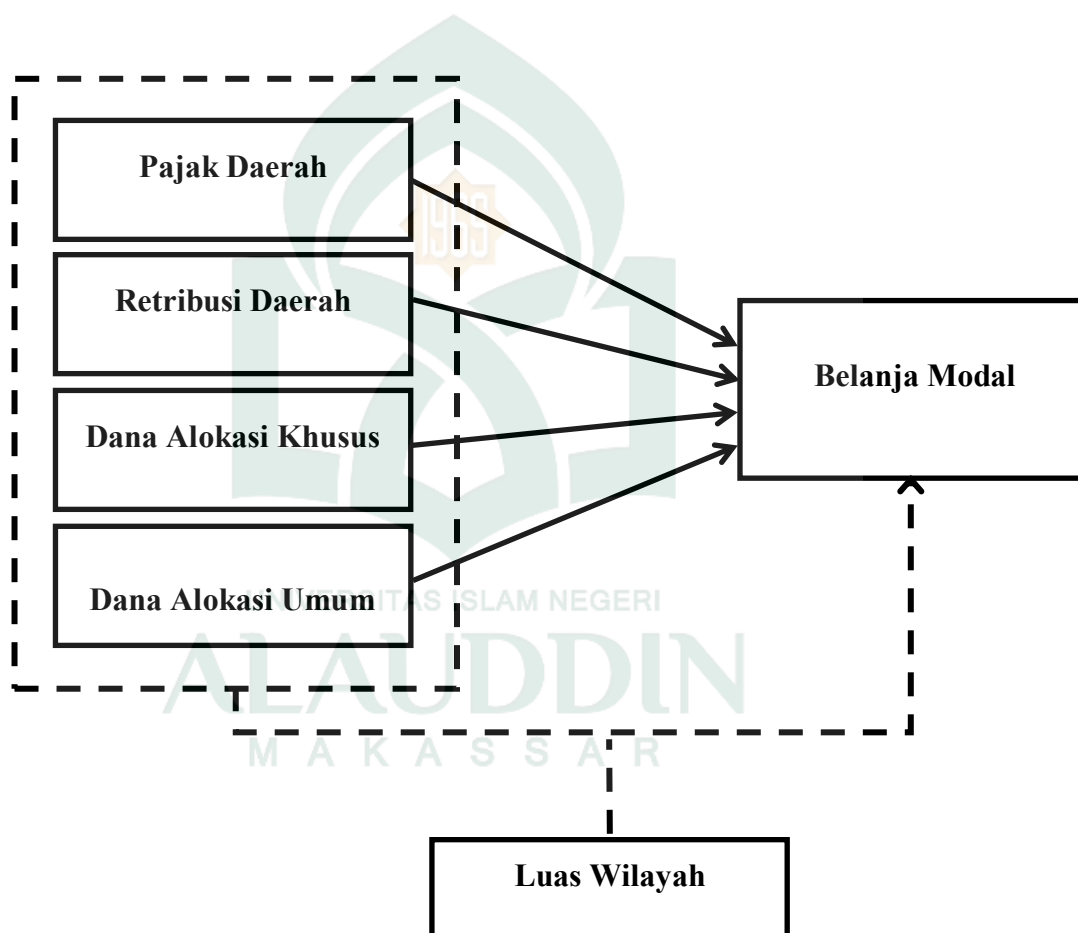
Variabel-variabel berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah dari sektor pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alasan pengambilan 2 variabel ini adalah karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan 2 variabel yang sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan daerah. Sedangkan dari sektor dana perimbangan, variabel yang berpengaruh adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Luas Wilayah merupakan salah satu pertimbangan dalam pengalokasian terhadap belanja modal sehingga dijadikan variabel moderating

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Gambaran Kerangka Pikir



Keterangan :

—————→ = Pengujian Parsial

— — — — ➔ = Pengujian Simultan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, Menurut (Kuncoro, 2013:145) penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numerik (angka), skor, dan analisisnya menggunakan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif.

Penelitian kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengelolanya dan menyajikanya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini Mencakup seluruh Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan dengan mengambil data APBD di Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan Jln. Haji Bau No. 6 Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

48

Penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas. Penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang didesain untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antarvariabel, pada umumnya hubungan sebab-akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara dan variabel terikat (Sanusi, 2011:14). Langkah-langkah penelitian kausalitas pada umumnya terdiri atas :

1. Menetapkan masalah penelitian;
2. Merumuskan tujuan penelitian secara spesifik;
3. Mengkaji teori dan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan;
4. Merumuskan hipotesis penelitian;
5. Menentukan ukuran sampel jika ukuran populasinya besar;
6. Mengklasifikasikan dan mendefinisikan variabel penelitian;
7. Menentukan metode pengumpulan data;
8. Melakukan pengujian hipotesis; serta
9. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis atau uji hipotesis, sekaligus melakukan verifikasi atas teori yang melatar belakangi penelitian yang dimaksud.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013:118). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 21 Kabupaten dan 3 Kota dari tahun 2012-2015. Sampel adalah sautau himpunan bagian dari unit populasi. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah populasi tresebut dengan alasan ketersediaan data dengan jumlah 24 Kabupaten/Kota x 4 tahun = 96 (N), jadi populasi ini merupakan sampel penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpul pihak lain (Kuncoro, 2013:148). Data sekunder ini berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Sulawesi Selatan dari tahun 2012-2015 mengenai jumlah anggaran pajak dearah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Luas Wilayah yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Sulewesi Selatan.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengumpulkan data sekunder baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114), dengan mengumpulkan data-data dari Laporan Realisasi APBD

Kabupaten/Kota sejak tahun 2012-2015 dan Luas Wilayah yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Sulawesi selatan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 21 *for windows*.

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, Luas Wilayah dan variabel Belanja Modal. Analisis deskriptif ini dapat diuji dengan menggunakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), maximum, minimum, dan standar deviasi, dan juga dapat dilihat dari klasifikasi masing-masing variabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013: 160) . Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati data normal. Jika terdapat data yang terdistribusi secara tidak normal maka uji statistik t dan f tidak dapat diterapkan. Pengujian tentang normal atau tidaknya suatu data dilakukan dengan 2 cara yaitu : dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik untuk melihat distribusi normal dapat dilihat dengan grafik histogram dan grafik normal Probability-Plot. Sedangkan dengan uji statistik dapat dilakukan dengan uji non parametric *Kolmogorov-Smirnov*.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Jika variabel bebas (independen) saling berkolerasi, maka variabel-variabel tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar

sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013: 105). Deteksi adanya multikolinearitas dipergunakan nilai VIF (Varian Inflation Factor), bila nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1 berarti data bebas multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013: 139). Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji *Scatterplot* adalah jika ada pola seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2013: 139). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan cara melihat nilai dari DW (*durbin-watson*), d_l dan d_u yang dilihat dari tabel *durbin-watson* dengan ketentuan :

Tabel 3.1

Ketentuan Nilai *Durbin-Watson*

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Ragu-Ragu	$d_l < d < d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Ragu-Ragu	$4 - d_u < d < 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

(Ghozali, 2013: 111).

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan.

Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

X_3 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_4 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi

e = error term

b. Uji Nilai Selisih Mutlak (*absolute difference value*)

Uji hipotesis moderating dilakukan dengan menggunakan uji nilai selisih mutlak dengan alasan model ini mampu mengatasi multikolinearitas yang umumnya terjadi sangat tinggi apabila menggunakan uji interaksi dan model ini memasukkan variabel efek utama dalam analisis regresi, sedangkan uji residual hanya memasukkan efek interaksi saja. Uji nilai selisih mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terganggunya.

Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 [X-Z] + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

X = Pendapatan daerah dari pajak, Rretribusi, DAU dan DAK

Z = Luas Wilayah

[X-Z] = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara pendapatan daerah dan Luas Wilayah

$\beta_1-\beta_3$ = Koefisien regresi

e = *error term*

Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasiuji, uji simultan (*f-test*) dan regresi secara parsial (*t-test*):

1) Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a) Jika R^2 mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat.

- b) Jika K_d menjauhi nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

2) Uji Regresi Secara Simultan (f)

Uji statistik “F” atau uji signifikansi simultan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Apabila nilai sig dari F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan / eror (α) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang di estimasi layak, sedangkan apabila nilai sig dari F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

3) Uji Regresi Secara Parsial (t)

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan *p-value* pada kolom Sig masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan 0,05.

Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$:

- a) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak
 b) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN

G. *Gambaran Umum Objek Penelitian*

1. Keadaan Geografis Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, Letak Wilayah Sulawesi Selatan yaitu 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas Wilayahnya 45.764,53 km² dengan Jumlah penduduk tahun 2015 adalah 8.520.304 jiwa yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.

2. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Sulawesi Selatan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018, merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke

depan mengenai organisasi sehingga organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi Sulawesi Selatan, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 adalah : "Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional Dan Simpul Jejaring Kesejahteraan Masyarakat" Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi tersebut, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan Misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

- a. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;
- b. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
- d. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
- e. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
- f. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
- g. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Kabupaten dan Kota DI Sulawesi Selatan

Adapun Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan serta jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan Luas Wilayahnya yaitu:

- a. Kabupaten Kepulauan Selayar (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Benteng)

Tabel 4.1

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Selayar

KABUPATEN SELAYAR				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	1,550,000	2,144,500	3,307,000	4,790,000
Retribusi	2,350,000	2,500,000	9,017,358	9,467,000
DAU	365,634,515	421,256,593	458,019,013	479,393,610
DAK	46,580,000	75,158,860	69,809,030	81,792,090
Belanja Modal	88,611,655	185,476,294	203,983,033	161,415,416
Luas Wilayah	903.50			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

b. Kabupaten Bantaeng (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Bantaeng)

Tabel 4.2

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Bantaeng

KABUPATEN BANTAENG				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	2,284,130	2,995,950	3,295,950	6,536,476
Retribusi	9,384,626	14,063,606	16,903,456	27,442,508
DAU	325,057,232	379,463,356	379,463,356	444,919,431
DAK	39,504,550	53,714,160	53,714,160	62,282,910
Belanja Modal	89,939,474	140,464,996	145,444,330	80,213,425
Luas Wilayah	395.83			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

c. Kabupaten Bulukumba (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Bulukumba)

Tabel 4.3

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Bulukumba

KABUPATEN BULUKUMBA				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	7,437,269	7,656,551	18,205,156	25,682,579

Retribusi	18,132,090	15,125,786	16,542,731	13,636,600
DAU	520,529,199	591,388,184	653,897,726	712,895,671
DAK	51,722,710	65,051,440	75,444,820	71,958,260
Belanja Modal	102,962,252	139,894,351	199,138,760	319,563,919
Luas Wilayah	1,154.67			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

d. Kabupaten Jeneponto (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Jeneponto)

Tabel 4.4

APBD (Ribu Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Jeneponto

KABUPATEN JENEPONTO				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	2,645,720	3,314,000	7,861,594	11,581,200
Retribusi	5,033,420	3,926,500	27,392,593	37,475,146
DAU	437,703,926	494,087,427	542,150,883	571,867,452
DAK	61,885,780	76,294,860	72,023,040	81,965,820
Belanja Modal	180,331,285	122,420,313	164,569,674	203,546,865
Luas Wilayah	903.35			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

e. Kabupaten Takalar (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Pattalassang)

Tabel 4.5

APBD (Ribu Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Takalar

KABUPATEN TAKALAR				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	3,507,000	3,581,250	5,504,845	15,928,290
Retribusi	21,366,238	22,417,629	31,181,376	12,256,016
DAU	409,280,603	479,073,701	565,195,363	554,136,141
DAK	46,835,800	48,956,910	64,132,720	62,688,360
Belanja Modal	98,034,330	100,151,785	128,167,152	119,852,381

Luas Wilayah	566.51
--------------	--------

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

f. Kabupaten Gowa (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Sungguminasa)

Tabel 4.6

APBD (Ribu Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Gowa

KABUPATEN GOWA				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	19,618,000	42,751,000	59,040,000	61,825,635
Retribusi	27,777,227	28,285,037	38,093,621	42,953,041
DAU	586,415,307	670,579,761	746,700,092	795,078,108
DAK	54,785,160	69,662,598	80,227,530	78,736,700
Belanja Modal	141,767,846	231,618,697	337,698,932	292,182,872
Luas Wilayah	1,883.32			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

g. Kabupaten Sinjai (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Sinjai)

Tabel 4.7

APBD (Ribu Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Sinjai

KABUPATEN SIJAI				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	3,452,565	3,897,700	8,146,200	8,714,000
Retribusi	3,943,853	6,818,135	6,371,827	6,219,254
DAU	416,771,464	474,528,814	521,628,340	541,097,983
DAK	38,021,790	46,854,480	55,315,050	69,738,470

Belanja Modal	93,124,511	103,920,547	141,031,451	146,518,482
Luas Wilayah	819.96			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

h. Kabupaten Maros (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Turikale)

Tabel 4.8

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Maros

KABUPATEN MAROS				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	31,500,000	46,399,000	59,199,000	64,201,000
Retribusi	13,200,000	27,751,000	33,507,000	58,644,200
DAU	455,829,227	540,383,322	614,598,482	645,209,768
DAK	49,906,540	51,205,510	78,426,630	78,334,030
Belanja Modal	144,502,156	269,019,544	326,574,666	345,771,909
Luas Wilayah	1,619.12			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

i. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Pangkajene)

Tabel 4.9

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Pangkep

KABUPATEN PANGKEP				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	36,512,534	46,950,034	62,909,499	68,585,110
Retribusi	17,338,247	21,337,628	23,677,108	37,719,734
DAU	485,962,003	566,929,217	623,418,990	650,132,194

DAK	46,460,490	78,201,060	72,547,490	84,050,220
Belanja Modal	153,547,875	200,493,815	251,148,553	325,223,133
Luas Wilayah	1,112.29			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

j. Kabupaten Barru (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Barru)

Tabel 4.10

APBD (Ribu Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Barru

KABUPATEN BARRU				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	4,715,000	6,670,000	9,170,000	8,670,000
Retribusi	12,437,687	13,861,817	14,763,882	12,911,437
DAU	358,904,488	417,942,379	471,135,015	488,014,810
DAK	42,032,280	43,713,440	50,755,420	65,231,920
Belanja Modal	80,311,350	98,635,525	132,239,116	154,900,002
Luas Wilayah	1,174.71			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

k. Kabupaten Bone (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Watampone)

Tabel 4.11

APBD (Ribu Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Bone

KABUPATEN BONE				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	10,948,080	14,895,850	29,406,819	32,178,841
Retribusi	10,834,087	13,446,184	15,376,587	14,005,988
DAU	754,025,482	867,813,851	950,401,934	977,807,065
DAK	89,442,570	88,244,460	86,315,710	97,960,110

Belanja Modal	222,681,932	202,540,700	203,883,720	210,234,144
Luas Wilayah	4,559.00			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

l. Kabupaten Soppeng (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Watan Soppeng)

Tabel 4.12

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Soppeng

KABUPATEN SOPPENG				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	3,147,295	3,376,500	8,534,506	9,591,100
Retribusi	12,774,189	7,669,712	7,731,606	9,574,863
DAU	446,410,179	517,805,122	569,126,996	589,049,244
DAK	33,832,040	49,276,640	43,719,300	59,314,280
Belanja Modal	94,913,873	130,218,511	167,284,362	162,222,285
Luas Wilayah	1,359.44			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

m. Kabupaten Wajo (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Sengkang)

Tabel 4.13

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Wajo

KABUPATEN WAJO				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	6,989,575	9,815,000	18,875,500	21,789,355
Retribusi	10,405,400	20,682,027	21,021,727	21,522,079
DAU	513,517,200	592,275,827	631,247,160	693,121,100

DAK	74,835,020	73,454,700	63,351,730	84,684,080
Belanja Modal	247,211,082	201,493,290	243,630,001	254,765,759
Luas Wilayah	2,506.20			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

- n. Kabupaten Sidenreng Rappang (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Sidenreng)

Tabel 4.14

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Sidrap

KABUPATEN SIDRAP				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	5,623,421	7,533,093	15,263,469	26,843,470
Retribusi	24,291,093	24,013,722	26,254,556	46,758,271
DAU	432,894,860	499,699,753	533,655,220	574,364,767
DAK	41,347,480	41,831,330	51,755,940	58,177,940
Belanja Modal	132,258,243	161,404,977	242,221,673	341,638,777
Luas Wilayah	1,883.25			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

- o. Kabupaten Pinrang (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Pinrang)

Tabel 4.15

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Pinrang

KABUPATEN PINRANG				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	5,141,057	5,141,056	12,178,728	13,178,728
Retribusi	19,871,556	19,871,556	5,785,794	4,455,536

DAU	502,508,309	574,244,531	629,285,550	654,528,422
DAK	44,568,230	63,154,020	56,046,540	67,404,200
Belanja Modal	132,278,977	137,736,010	167,048,474	182,261,264
Luas Wilayah	1,961.17			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

- p. Kabupaten Enrekang (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Enrekang)

Tabel 4.16

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Enrekang

KABUPATEN ENREKANG				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	1,804,000	2,000,000	4,966,000	6,130,000
Retribusi	5,548,665	9,076,622	12,467,500	19,294,650
DAU	384,422,103	436,542,180	484,907,285	526,156,287
DAK	42,116,080	48,908,340	50,131,700	59,140,340
Belanja Modal	109,946,447	128,812,194	140,569,896	191,139,001
Luas Wilayah	1,786.01			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

- q. Kabupaten Luwu (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Belopa)

Tabel 4.17

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Luwu

KABUPATEN LUWU				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	4,310,000	5,747,053	8,735,000	11,430,000

Retribusi	10,239,789	13,540,817	16,379,153	28,337,696
DAU	475,295,053	542,118,000	595,699,150	624,131,623
DAK	54,806,460	59,690,400	68,010,320	90,972,710
Belanja Modal	92,211,847	115,115,015	158,759,573	161,069,662
Luas Wilayah	3,000.25			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan



- r. Kabupaten Tana Toraja (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Makale)

Tabel 4.18

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Tanah Toraja

KABUPATEN TANAH TORAJA				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	2,348,050	2,398,050	2,398,050	4,980,454
Retribusi	20,981,293	24,046,292	27,640,851	50,381,825
DAU	389,286,812	444,741,329	486,447,423	510,857,220
DAK	64,649,650	55,955,450	58,947,980	70,986,610
Belanja Modal	166,790,547	131,553,777	190,382,329	193,561,537
Luas Wilayah	2,054.30			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

- s. Kabupaten Luwu Utara (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Masamba)

Tabel 4.19

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Luwu Utara

KABUPATEN LUWU UTARA				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	4,073,930	5,624,730	9,346,772	11,202,581
Retribusi	27,340,418	30,307,043	8,416,664	15,676,642
DAU	457,250,496	512,644,776	573,100,112	601,496,441
DAK	43,516,120	53,187,510	51,879,100	76,873,460
Belanja Modal	150,377,052	155,745,021	138,954,930	186,128,682
Luas Wilayah	7,502.68			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

- t. Kabupaten Luwu Timur (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Malili)

Tabel 4.20

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Luwu Timur

KABUPATEN LUWU TIMUR				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	67,003,680	72,028,200	90,139,000	79,128,300
Retribusi	10,421,784	16,740,305	12,191,228	7,491,310
DAU	365,829,499	410,974,651	462,819,314	473,135,918
DAK	44,724,510	38,909,600	55,595,030	68,195,690
Belanja Modal	260,270,391	317,799,222	377,763,455	455,671,284
Luas Wilayah	6,944.88			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

- u. Kabupaten Toraja Utara (Pusat Pemerintahan / Ibu Kota : Rantepao)

Tabel 4.21

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kabupaten Toraja Utara

KABUPATEN TORAJA UTARA				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	4,126,232	4,593,500	8,320,926	10,095,828
Retribusi	5,240,569	8,865,669	8,265,714	9,092,919
DAU	348,127,616	404,597,214	448,417,228	471,481,781
DAK	52,577,990	85,464,350	86,030,180	84,558,100
Belanja Modal	135,841,714	172,261,216	178,469,142	159,961,781
Luas Wilayah	1,151.47			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

v. Kota Makassar

Tabel 4.22

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kota Makassar

KOTA MAKASSAR				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	337,167,338	436,725,028	501,718,650	822,081,993
Retribusi	84,141,194	70,300,940	84,844,404	115,273,184
DAU	911,122,797	1,033,583,903	1,114,853,212	1,198,866,380
DAK	32,644,320	40,886,000	64,792,920	31,700,180
Belanja Modal	333,091,925	321,839,389	521,328,029	697,659,475
Luas Wilayah	175.77			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

w. Kota Parepare

Tabel 4.23

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kota Parepare

KOTA PAREPARE				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	9,658,900	13,000,000	18,575,000	19,148,780
Retribusi	7,750,095	9,612,625	7,689,660	12,851,380
DAU	332,459,112	384,096,063	426,405,955	430,750,753
DAK	50,362,700	45,798,230	32,485,350	41,447,990
Belanja Modal	115,995,571	132,001,245	123,605,380	137,958,233
Luas Wilayah	99.33			

Sumber : BPS Sulawesi Selatan

x. Kota Palopo

Tabel 4.24

APBD (Ribuan Rupiah) dan Luas Wilayah (Km²) Kota Palopo

KOTA PALOPO				
Variabel Penelitian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Pajak	5,199,743	6,214,743	14,403,873	16,003,178
Retribusi	22,258,160	5,698,170	5,990,930	4,987,300
DAU	361,383,685	408,527,791	449,242,430	476,408,524
DAK	38,000,330	39,243,130	36,481,000	51,693,840
Belanja Modal	86,867,389	98,452,508	98,112,980	102,755,725
Luas Wilayah	247.52			

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standard deviasi data yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.25

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	96	1550000.00	822081993.00	38291820.22	110360237.07
Retribusi	96	2350000.00	115273184.00	20093295.90	18378396.10
DAU	96	325057232.00	1198866380.00	544985789.94	165866373.68
DAK	96	31700180.00	97960110.00	59747948.72	16099141.30
Luas_Wilayah	96	99.33	7502.68	1906.84	1884.03

Belanja_Modal	96	80213425.00	697659475.00	187720461.36	99551280.77
Valid N (listwise)	96				

Dalam ribuan rupiah dan Km² (dari tahun 2012-2015)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel 4.25 di atas dengan 96 sampel dapat dijelaskan bahwa :

- Rata-rata dari pajak adalah Rp. 38.291.820.220 pertahunnya dengan jumlah pajak terendah Rp. 1.550.000.000 yang diterima oleh Kabupaten Selayar pada tahun 2012 dan pajak tertinggi yaitu Kota Makassar pada tahun 2015 sebesar Rp. 822.081.993.000 dengan standar deviasi Rp. 110.360.237.070.
- Rata-rata dari Retribusi adalah Rp. 20.093.295.900 pertahunnya dengan jumlah retribusi terendah Rp. 2.350.000.000 yang diterima oleh kabupaten Selayar pada tahun 2012 dan retribusi tertinggi yaitu Kota Makassar pada tahun 2015 sebesar Rp. 115.273.184.000 dengan standar deviasi Rp. 18.378.396.100.
- Rata-rata dari DAU adalah Rp. 544.985.789.940 pertahunnya dengan jumlah DAU terendah Rp. 325.057.232.000 yang diterima oleh kabupaten Bantaeng pada tahun 2012 dan DAU tertinggi yaitu Kota Makassar pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.198.866.380.000 dengan standar deviasi Rp. 165.866.373.680.
- Rata-rata dari DAK adalah Rp. 59.747.948.720 pertahunnya dengan jumlah DAK terendah Rp. 31.700.180.000 yang diterima oleh Kota Makassar pada tahun 2015 dan DAK tertinggi yaitu Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebesar Rp. 97.960.110.000 dengan standar deviasi Rp. 16.099.141.300.

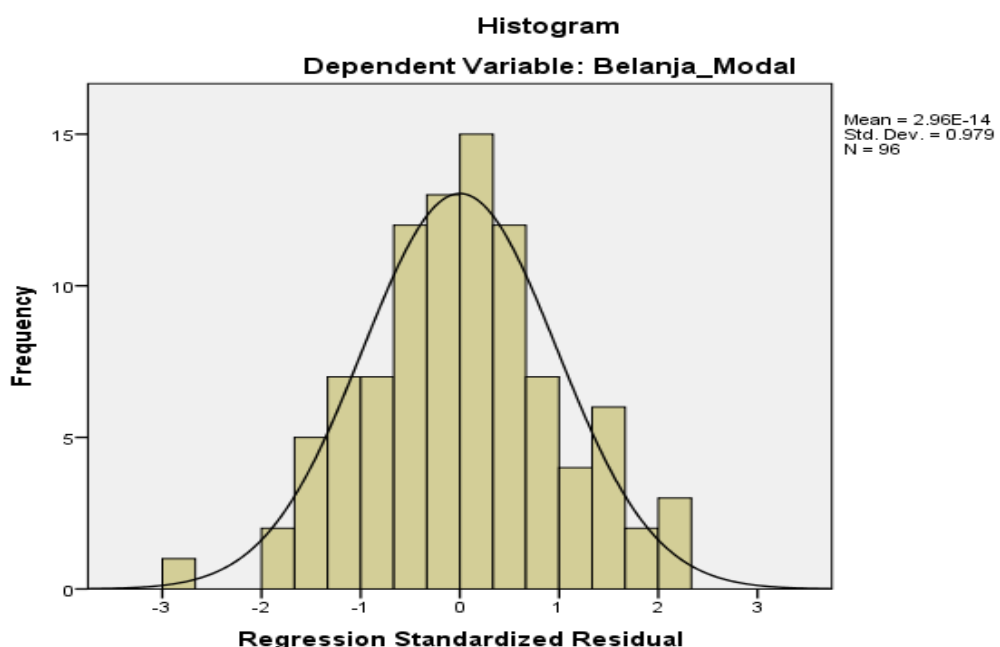
- e. Rata-rata dari Belanja Modal adalah Rp. 187.720.461.360 pertahunnya dengan jumlah Belanja Modal terendah Rp. 80.213.425.000 yang dialokasikan oleh Kabupaten Bantaeng pada tahun 2015 dan Belanja Modal tertinggi yaitu Kota Makassar pada tahun 2015 sebesar Rp. 697.659.475.000 dengan standar deviasi Rp. 99.551.280.770 .
- f. Luas Wilayah di Sulawesi Selatan yang paling luas adalah Kabupaten Luwu Utara dengan luas 7.502,68 Km² dan paling sempit adalah Kota Pare-pare dengan luas wilayah 99,33 Km² .

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

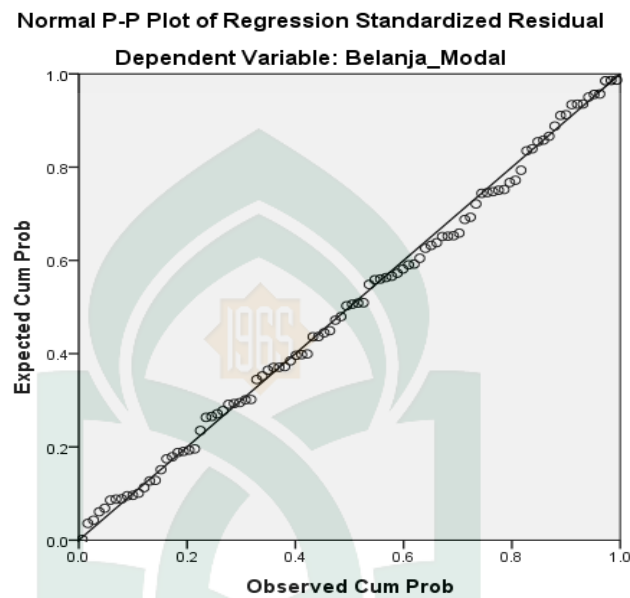
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian tentang normal atau tidaknya data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu : dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik untuk melihat distribusi normal dapat dilihat dengan grafik histogram dan grafik normal Probability-Plot. Sedangkan dengan uji statistik dapat dilakukan dengan uji non parametric *Kolmogorov-Smirnov*.

Gambar 4.1



Berdasarkan histogram (gambar 4.1), dapat dilihat bahwa kenaikan/ penurunan data observasi mendekati garis melengkung dan tidak melenceng kekiri ataupun kekanan yang menggambarkan distribusi normal.

Gambar 4.2



Hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* pada gambar 4.2, dimana terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Tabel 4.26

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23661381
Most Extreme Differences	Absolute	.047

Positive	.047
Negative	-.032
Kolmogorov-Smirnov Z	.456
Asymp. Sig. (2-tailed)	.985

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tabel 4.26 menunjukkan nilai 0,456 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,985. Karena hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikansi diatas 0,05 (sebesar 0,985) maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil uji ini memperkuat hasil uji normalitas dengan grafik distribusi dimana keduanya menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antarvariabel independen. Jika tidak terjadi korelasi antarvariabel independen maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut baik. Untuk mengetahui adanya multikolonieritas, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cut-off yang biasa dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

Tabel 4.27

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7.025	3.190		2.202	.030		
1 Pajak	.231	.028	.677	8.184	.000	.467	2.141
Retribusi	.096	.040	.167	2.395	.019	.660	1.516
DAU	-.012	.149	-.007	-.081	.936	.395	2.533
DAK	.466	.102	.292	4.582	.000	.785	1.273

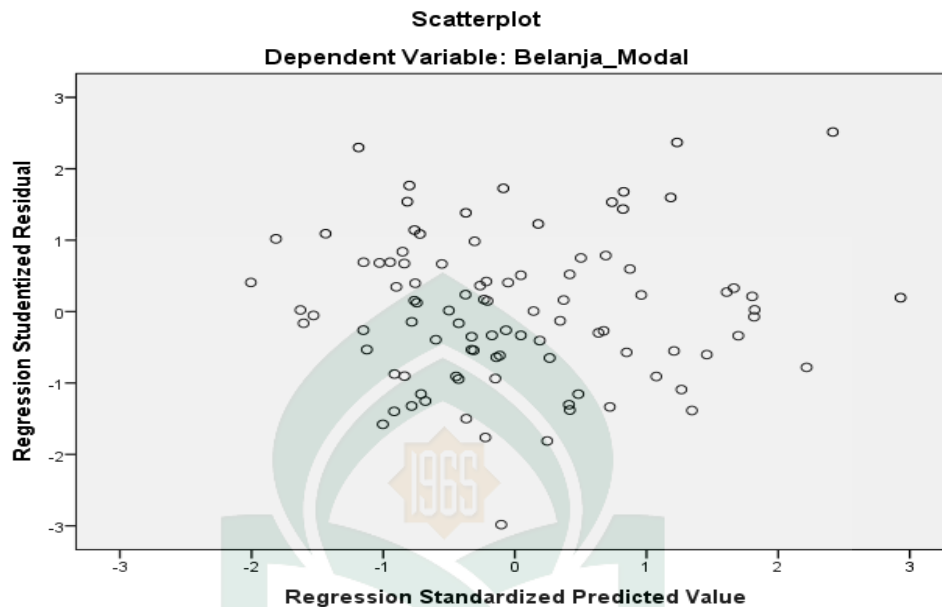
a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas (tabel 4.27), dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pajak sebesar 0,467, retribusi 0,660, DAU 0,395, dan DAK 0,785, Keempat variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antarvariabel independen. Hasil yang sama dilihat dari nilai VIF keempat variabel independen yang menunjukkan angka dibawah 10 (pajak 2,141, retribusi 1,516, DAU 2,533 dan DAK 1,273). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas antarvariabel.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Gambar 4.3



Hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang menyebar secara tidak beraturan secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan cara melihat nilai dari DW (*durbin-watson*), d_l dan d_u yang dilihat dari tabel *durbin-watson* dengan ketentuan :

Tabel 4.28

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Ragu-Ragu	$d_l < d < d_u$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4-d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	Ragu-Ragu	$4-d_u < d < 4-d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$d_u < d < 4-d_u$

(Ghozali, 2013: 111).

Tabel 4.29**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.842 ^a	.709	.696	.2417582	2.139

a. Predictors: (Constant), DAK, Pajak, Retribusi, DAU

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi (Tabel 4.29), maka dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 2,139. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 96 dan jumlah variabel independen 4 ($k=4$). Oleh karena nilai DW 2,139 lebih besar dari batas atas (d_u) 1,755 dan kurang dari ($4-d_u$) 2,245 atau $1,755 < 2,139 < 2,245$, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terdapat autokorelasi (sesuai dengan tabel pengambilan keputusan).

3. Uji Hipotesis

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan pajak, retribusi, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal dengan melihat kekuatan hubungan antar Belanja Modal dengan, retribusi, DAU, dan DAK. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian :

Tabel 4.30

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	7.025	3.190		2.202	.030	
Pajak	.231	.028	.677	8.184	.000	
Retribusi	.096	.040	.167	2.395	.019	
DAU	-.012	.149	-.007	-.081	.936	
DAK	.466	.102	.292	4.582	.000	

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Dari tabel 4.30 di atas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = 7,025 + 0,231 \text{ Pajak} + 0,96 \text{ Retribusi} - 0,012 \text{ DAU} + 0,466$$

1. Konstanta (nilai mutlak Y) sebesar 7,025 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka alokasi Belanja Modal tiap daerah sebesar 7,025 (dalam jutaan rupiah).
2. Koefisien regresi Pajak sebesar 0,231 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan pajak sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,231 atau sebesar 23,1%.

3. Koefisien regresi Retribusi sebesar 0,096 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan retribusi sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,096 atau 9,6%.
4. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar -0,012, karena berjumlah negatif berarti setiap ada kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1% maka akan menurunkan Belanja Modal sebesar 0,012 atau 1,2 %
5. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,466 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan retribusi sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,466 atau 46,6 %.

1) Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 4.31 berikut ini:

Tabel 4.31

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.709	.696	.2417582

Berdasarkan Model Summary di atas, nilai R adalah 0.842 menunjukkan bahwa korelasi atau kekuatan asosiasi (hubungan) linier antar variabel merupakan korelasi yang kuat antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Belanja Modal dan dilihat koefisien determinasi nya (R^2) sebesar 0,709. Hal ini berarti 70,9% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen

yaitu pajak, retribusi, DAU dan DAK, Sedangkan sisanya ($100\% - 70,9\% = 29,1\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

2) Uji Regresi Secara Simultan (f)

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.32

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	12.956	4	3.239	55.418	.000 ^b
Residual	5.319	91	.058		
Total	18.275	95			

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, Pajak, Retribusi, DAU

Hasil Uji statistik F pada tabel 4.32 diatas untuk menguji pengaruh pajak, retribusi, DAU dan DAK yang mempunyai F-hitung sebesar 55,418 dengan nilai signifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar $55,418 > F\text{-tabel}$ sebesar 2,47 yang artinya H_5 diterima maka dapat disimpulkan bahwa pajak, retribusi, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

3) Uji Regresi Secara Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 4.9 sehingga dapat disimpulkan bahwa :

Tabel 4.33

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.025	3.190		2.202	.030
1 Pajak	.231	.028	.677	8.184	.000
Retribusi	.096	.040	.167	2.395	.019
DAU	-.012	.149	-.007	-.081	.936
DAK	.466	.102	.292	4.582	.000

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Dari table 4.33 di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Hasil Uji t untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 8,184 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $8,184 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,661 yang artinya bahwa H1 diterima sehingga Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Hasil Uji t untuk H2 diperoleh hasil t-hitung sebesar 2,395 dengan signifikansi sebesar 0,019. Nilai signifikan untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $2,395 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,661 yang artinya bahwa H2 diterima sehingga ada pengaruh yang signifikan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.
3. Hasil Uji t untuk H3 diperoleh hasil t-hitung sebesar -0,081 dengan signifikansi sebesar 0,936. Nilai signifikan untuk variabel DAU menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan

nilai t-hitung $-0,081 < t\text{-tabel}$ sebesar 1,661 yang artinya bahwa H3 ditolak sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4. Hasil Uji t untuk H4 diperoleh hasil t-hitung sebesar 4,582 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikan untuk variabel DAK menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $4,582 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,661 yang artinya bahwa H4 diterima sehingga ada pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

d. Pengujian nilai selisih mutlak (*absolute difference value*)

Pengujian nilai selisih mutlak dilakukan untuk mengetahui pengaruh Luas Wilayah sebagai variable moderating terhadap hubungan pendapatan daerah dari pajak, retribusi DAU dan DAK dengan Belanja Modal . Berikut merupakan tabel dari hasil pengujian nilai selisih mutlak :

Tabel 4.34

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.794	.041	624.050	.000
	Zscore(Pendapatan_D)	.285	.034	.649	.000
	Zscore(Luas_Wilayah)	.095	.030	.216	.003
	AbsX_Z	.067	.033	.160	.047

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Dari tabel 4.34 di atas dapat dilihat nilai signifikan dari interaksinya (AbsX_Z) sebesar 0,047 menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan koefisien regresinya bernilai positif sebesar 0,067, dilihat juga dari t-hitung $2,010 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,661 yang artinya bahwa H6 diterima

sehingga Luas Wilayah mampu memoderasi pajak, retribusi, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap pengalokasian belanja modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, ini dilihat dari uji t pada tabel 4.33, sangat signifikan sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (*B*) bernilai positif yaitu 0,231, sehingga hipotesis pengaruh Pajak Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal diterima, ini berarti jika Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan (Hasbiullah, 2015:139) menyatakan pajak dipergunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional salah satunya dengan mengalokasikan pajak tersebut ke Belanja Modal yang dimanfaatkan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat seperti dalam penelitian ini hasil yang menunjukkan pajak yang berpengaruh terhadap belanja modal ini berarti sudah mencapai tujuan dari pajak yang dijelaskan dalam Undang-undang .

Pajak Daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk Belanja Modal, ini berarti di Sulawesi Selatan

dari tahun 2012-2015 mengalokasikan pajaknya untuk Belanja Modal . Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sianturi pada tahun 2010 yang menyimpulkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal, tapi ini berbeda dengan penelitian Mamonto, Kalangi dan Krest pada tahun 2014 yang menyatakan secara parsial variabel Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal karna pendapatan dari pajak yang kurang sehingga mengandalakan dana perimbangan untuk membiayai Belanja Modalnya.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap pengalokasian belanja modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, ini dilihat dari uji t pada tabel 4.33, signifikan sebesar 0,019 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (*B*) bernilai positif yaitu 0,096, sehingga hipotesis pengaruh Retribusi Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal diterima, ini berarti jika Retribusi Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

Undang-undang No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah salah satunya yaitu Belanja Modal. Jika Retribusi Daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan penelitian ini berarti sebagian besar di Sulawesi Selatan dari tahun 2012-2015 mengalokasikan retribusinya untuk

Belanja Modal, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sulistyowati pada tahun 2011 menyatakan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, sehingga apabila terjadi kenaikan pada Retribusi Daerah, maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sianturi pada tahun 2010 bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan.

3. Pengaruh DAU terhadap pengalokasian belanja modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan bernilai negatif, ini dilihat dari uji t pada tabel 4.33, signifikan sebesar 0,936 dimana jauh lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai negatif yaitu -0,012, sehingga hipotesis pengaruh DAU terhadap pengalokasian Belanja Modal ditolak, ini berarti naik turunnya DAU tidak mempengaruhi Belanja Modal, ini diindikasikan, disebabkan karena penerimaan DAU lebih kearah belanja oprasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Dari analisis deskriptif, memang penerimaan dari DAU sangat besar dibanding pendapatan yang lain, terlihat rata-rata dari DAU sebesar Rp. 544.985.789.940 pertahunnya, tapi sudah dijelaskan sebelumnya dilatar belakang masalah penelitian, bahwa belanja oprasinya pun sangat besar yang sangat jauh lebih besar daripada Belanja Modalnya.

Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori keagenan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi,

tetapi lebih banyak menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik atau mementingkan dirinya sendiri dari pihak legislatif sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini diindikasikan terjadi karena pihak prinsipal (legislatif) lebih mementingkan kebutuhannya sendiri dan kurangnya informasi yang dimiliki oleh legislatif dari pada eksekutif yang berperan sebagai agen yang memiliki informasi keuangan yang lebih dari pada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan, padahal dalam hubungannya dengan publik, legislatif bertindak sebagai agen yang seharusnya mengikuti keinginan rakyat yang memilihnya sebagai wakil dari rakyat. Rakyat selalu menginginkan pelayanan yang baik dari pemerintah yang bisa dilihat dengan pengalokasian Belanja Modal karena dampaknya langsung ke masyarakat dan dilihat langsung masyarakat. Jika pengalokasian Belanja Modal kurang maksimal akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAU merupakan pendapatan yang diterima daerah dari pemerintah pusat untuk pemerataan keuangan antar daerah, jika DAU tidak dialokasikan untuk Belanja Modal ini akan bermasalah terhadap daerah yang memiliki PAD yang rendah otomatis Belanja Modalnya pun rendah karena hanya mengandalkan PADnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sulistyowati pada tahun 2011 yang menyatakan DAU daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada DAU, maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal, Sedangkan penelitian ini sejalan

dengan yang dilakukan Kusnandar dan Dodik pada tahun 2012 yang menyimpulkan, secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal karena DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk Belanja Modal. Inipun sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arwati dan Hadiati pada tahun 2013 yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

4. Pengaruh DAK terhadap pengalokasian belanja modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, ini dilihat dari uji t pada tabel 4.33, signifikan sangat tinggi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 0,466, sehingga hipotesis pengaruh DAK daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal diterima, yang berarti jika DAK suatu daerah meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.

Menurut (Reyowijoyo, 2010:174) DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu yang diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. sedangkan menurut (Nordiawan dan Ayunigtiayas, 2010:26) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam Belanja Modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wandira tahun 2013 menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal, sedangkan dalam penelitian Handayani dan Elva pada tahun 2012 menyatakan DAK tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah, karena kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

5. Pengaruh secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap pengalokasi Belanja Modal

Berdasarkan pengujian simultan (f) , variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal, ini dilihat dari uji f pada tabel 4.32, signifikansi senilai 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ (0,05) dan dilihat dari pengujian koefisien determinasi ($R Square$) pada tabel 4.31 sebesar 0,709. Hal ini berarti 70,9% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu pajak, retribusi, DAU dan DAK, Sedangkan sisanya ($100\% - 70,9\% = 29,1\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Pajak daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK semuanya merupakan pendapatan daerah yang dapat dialokasikan

untuk membiayai kebutuhan suatu daerah salah satunya adalah Belanja Modal yang sangat berguna untuk pelayanan kepada masyarakat.

6. Pengaruh Luas Wilayah terhadap hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK dengan Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Luas Wilayah mampu memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal, ini dilihat dari uji nilai seisi mutlak pada tabel 4.34, signifikan sebesar 0,047 dimana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 0,067 sehingga dapat dikatakan luas wilayah dapat memperkuat hubungan pendapatan daerah terhadap Belanja Modal, ini berarti di Sulawesi Selatan ketika Luas Wilayahnya bertambah 1% maka akan menambah Belanja Modal sebesar 6,7 %. Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah Luas Wilayah. Daerah dengan wilayah yang lebih luas akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Luas Wilayah suatu daerah dapat dijadikan ukuran suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan terutama berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jaringan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan akan mempermudah akses ke suatu daerah dan dapat memperlancar transportasi

sehingga dapat memperlancar arus barang dari daerah satu ke daerah yang lain. Lancarnya arus barang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Dan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri. Hasil dari pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Kusnandar dan Dodik, 2012:16) yang menjadikan luas wilayah sebagai variabel independen (variabel bebas), menyatakan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi Belanja Modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian Belanja Modal ini berarti, jika Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.
2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian Belanja Modal ini berarti, jika Retribusi Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal dikarenakan pendapata dari DAU lebih di arahkan ke belanja oprasi seperi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian Belanja Modal ini berarti, jika DAK meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.
5. Secara simultan atau bersama-sama variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal.

6. Dari uji nilai selisih mutlak variabel Luas Wilayah mampu memoderasi dan memperkuat hubungan pendapatan daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap pengalokasian Belanja Modal Belanja Modal.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DAU yang secara langsung tidak signifikan dan bertanda negatif terhadap Belanja Modal, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran Belanja Modal.
2. Eksekutif sebagai agen dengan legislatif sebagai prinsipal seharusnya bekerjasama dengan baik untuk kepentingan rakyat, tanpa mementingkan kebutuhan masing-masing. Legislatif seharusnya terjun langsung ke masyarakat dan melihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk perencanaan pengalokasian anggaran yang mengarah ke kesejahteraan masyarakat seperti pengalokasian terhadap Belanja Modal.
3. Melihat Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan DAK memiliki tingkat signifikan terhadap Belanja Modal, maka ketiga variabel tersebut harus tetap ditingkatkan, apalagi pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan pendapatan asli daerah itu sendiri yang menggambarkan mandiri atau tidaknya suatu daerah.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya seperti penerimaan pembiayaan pada APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel moderating yang lain seperti pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.



DAFTAR PUSTAKA

- Arbincan, Okto. 2012. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Apbd Di Pemerintahan Kota Di Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Arwati, Dini dan Novita Hadiati. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan. ISBN: 979-26-0266-6, Semarang.
- Clement, R. W. 2005. *The lessons from stakeholder theory for U.S. business leaders*. *Business Horizons*, 48, 255—264.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Yogyakarta. Andi.
- Ghozali, Imam. 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21 Cetakan VII*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hagen, Jürgen Von. 2002. *Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance*. Centre for European Integration Studies, Bonn. *The Economic and Social Review*, Vol. 33, No. 3, Winter, 2002, pp. 263-284.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi keuangan daerah Edisi 4*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2, Nomor 1, Hal.: 53-64.
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Madiun.

- Hasbiullah. 2015. *Ekonomi publik suatu perbandingan konsep ekonomi islam dengan teori konvensional*. Makassar. Alauddin University Press.
- Irawan. 2011. *Central Government's Roles in New Autonomous Region Development in Bandung Barat*. International Journal of Administrative Science & Organization, 18(2), pp: 122-131.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), pp: 305-360.
- Jaya, Putu dan Dwirandra. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92. ISSN: 2302-8556.
- Kolk, A., & Pinkse, J. (2006). *Stakeholder Mismanagement and Corporate Social Responsibility Crises*. European Management Journal, 24(1), 59–72.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Universitas Indonesia.
- Mamonto, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014. *Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah Terhadap belanja modal*. Jurnal ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Nordiawan, Deddi dan Ayunigtiayas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *tentang Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Puspitasari, Ni Luh. Made Pradana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2015. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Volume 3 No. 1.
- Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. *Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening*, Skripsi, Publikasi, Universitas Negeri Semarang.
- Reyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta. Mitra Wcana Media.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba empat
- Setiawan, Anjar. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Sianturi, Agave. 2010. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Medan Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sukmawati Resiana, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten*. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Volume 4.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja*

Modal. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.

Wertianti, I G A Gede i dan Dwirandra. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pad Dan Dau Sebagai Variabel Moderasi*.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.3 567-584.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Yusin, Jumay. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*.Skripsi. Fakultas Ekonomi Medan Departemen Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan.

L A M P I R A N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PAJAK DAERAH DALAM RUPIAH				
Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Selayar	1,550,000,000	2,144,500,000	3,307,000,000	4,790,000,000
Bulukumba	7,437,269,000	7,656,551,000	18,205,156,000	25,682,579,000
Bantaeng	2,284,130,000	2,995,950,000	3,295,950,000	6,536,476,000
Jeneponto	2,645,720,000	3,314,000,000	7,861,594,000	11,581,200,000
Takalar	3,507,000,000	3,581,250,000	5,504,845,000	15,928,290,000
Gowa	19,618,000,000	42,751,000,000	59,040,000,000	61,825,635,000
Sinjai	3,452,565,000	3,897,700,000	8,146,200,000	8,714,000,000
Maros	31,500,000,000	46,399,000,000	59,199,000,000	64,201,000,000
Pangkep	36,512,534,000	46,950,034,000	62,909,499,000	68,585,110,000
Barrau	4,715,000,000	6,670,000,000	9,170,000,000	8,670,000,000
Bone	10,948,080,000	14,895,850,000	29,406,819,000	32,178,841,000
Soppeng	3,147,295,000	3,376,500,000	8,534,506,000	9,591,100,000
Wajo	6,989,575,000	9,815,000,000	18,875,500,000	21,789,355,000
Sidrap	5,623,421,000	7,533,093,000	15,263,469,000	26,843,470,000
Pinrang	5,141,057,000	5,141,056,000	12,178,728,000	13,178,728,000
Enrekang	1,804,000,000	2,000,000,000	4,966,000,000	6,130,000,000
Luwu	4,310,000,000	5,747,053,000	8,735,000,000	11,430,000,000
Toraja	2,348,050,000	2,398,050,000	2,398,050,000	4,980,454,000
Luwu Utara	4,073,930,000	5,624,730,000	9,346,772,000	11,202,581,000
Luwu Timur	67,003,680,000	72,028,200,000	90,139,000,000	79,128,300,000
Toraja Utara	4,126,232,000	4,593,500,000	8,320,926,000	10,095,828,000
Makassar	337,167,338,000	436,725,028,000	501,718,650,000	822,081,993,000
Pare-Pare	9,658,900,000	13,000,000,000	18,575,000,000	19,148,780,000
Palopo	5,199,743,000	6,214,743,000	14,403,873,000	16,003,178,000
RETRIBUSI DAERAH DALAM RUPIAH				
Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Selayar	2,350,000,000	2,500,000,000	9,017,358,000	9,467,000,000
Bulukumba	18,132,090,000	15,125,786,000	16,542,731,000	13,636,600,000
Bantaeng	9,384,626,000	14,063,606,000	16,903,456,000	27,442,508,000
Jeneponto	5,033,420,000	3,926,500,000	27,392,593,000	37,475,146,000
Takalar	21,366,238,000	22,417,629,000	31,181,376,000	12,256,016,000
Gowa	27,777,227,000	28,285,037,000	38,093,621,000	42,953,041,000
Sinjai	3,943,853,000	6,818,135,000	6,371,827,000	6,219,254,000
Maros	13,200,000,000	27,751,000,000	33,507,000,000	58,644,200,000
Pangkep	17,338,247,000	21,337,628,000	23,677,108,000	37,719,734,000
Barrau	12,437,687,000	13,861,817,000	14,763,882,000	12,911,437,000
Bone	10,834,087,000	13,446,184,000	15,376,587,000	14,005,988,000
Soppeng	12,774,189,000	7,669,712,000	7,731,606,000	9,574,863,000
Wajo	10,405,400,000	20,682,027,000	21,021,727,000	21,522,079,000

Sidrap	24,291,093,000	24,013,722,000	26,254,556,000	46,758,271,000
Pinrang	19,871,556,000	19,871,556,000	5,785,794,000	4,455,536,000
Enrekan	5,548,665,000	9,076,622,000	12,467,500,000	19,294,650,000
Luwu	10,239,789,000	13,540,817,000	16,379,153,000	28,337,696,000
Toraja	20,981,293,000	24,046,292,000	27,640,851,000	50,381,825,000
Luwu Utara	27,340,418,000	30,307,043,000	8,416,664,000	15,676,642,000
Luwu Timur	10,421,784,000	16,740,305,000	12,191,228,000	7,491,310,000
Toraja Utara	5,240,569,000	8,865,669,000	8,265,714,000	9,092,919,000
Makassar	84,141,194,000	70,300,940,000	84,844,404,000	115,273,184,000
Pare-Pare	7,750,095,000	9,612,625,000	7,689,660,000	12,851,380,000
Palopo	22,258,160,000	5,698,170,000	5,990,930,000	4,987,300,000

DANA ALOKASI UMUM (DAU) DALAM RUPIAH				
Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Selayar	365,634,515,000	421,256,593,000	458,019,013,000	479,393,610,000
Bulukumba	520,529,199,000	591,388,184,000	653,897,726,000	712,895,671,000
Bantaeng	325,057,232,000	379,463,356,000	379,463,356,000	444,919,431,000
Jeneponto	437,703,926,000	494,087,427,000	542,150,883,000	571,867,452,000
Takalar	409,280,603,000	479,073,701,000	565,195,363,000	554,136,141,000
Gowa	586,415,307,000	670,579,761,000	746,700,092,000	795,078,108,000
Sinjai	416,771,464,000	474,528,814,000	521,628,340,000	541,097,983,000
Maros	455,829,227,000	540,383,322,000	614,598,482,000	645,209,768,000
Pangkep	485,962,003,000	566,929,217,000	623,418,990,000	650,132,194,000
Barru	358,904,488,000	417,942,379,000	471,135,015,000	488,014,810,000
Bone	754,025,482,000	867,813,851,000	950,401,934,000	977,807,065,000
Soppeng	446,410,179,000	517,805,122,000	569,126,996,000	589,049,244,000
Wajo	513,517,200,000	592,275,827,000	631,247,160,000	693,121,100,000
Sidrap	432,894,860,000	499,699,753,000	533,655,220,000	574,364,767,000
Pinrang	502,508,309,000	574,244,531,000	629,285,550,000	654,528,422,000
Enrekan	384,422,103,000	436,542,180,000	484,907,285,000	526,156,287,000
Luwu	475,295,053,000	542,118,000,000	595,699,150,000	624,131,623,000
Toraja	389,286,812,000	444,741,329,000	486,447,423,000	510,857,220,000
Luwu Utara	457,250,496,000	512,644,776,000	573,100,112,000	601,496,441,000
Luwu Timur	365,829,499,000	410,974,651,000	462,819,314,000	473,135,918,000
Toraja Utara	348,127,616,000	404,597,214,000	448,417,228,000	471,481,781,000
Makassar	911,122,797,000	1,033,583,903,000	1,114,853,212,000	1,198,866,380,000
Pare-Pare	332,459,112,000	384,096,063,000	426,405,955,000	430,750,753,000
Palopo	361,383,685,000	408,527,791,000	449,242,430,000	476,408,524,000

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DALAM RUPIAH				
Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Selayar	46,580,000,000	75,158,860,000	69,809,030,000	81,792,090,000
Bulukumba	51,722,710,000	65,051,440,000	75,444,820,000	71,958,260,000
Bantaeng	39,504,550,000	53,714,160,000	53,714,160,000	62,282,910,000
Jeneponto	61,885,780,000	76,294,860,000	72,023,040,000	81,965,820,000
Takalar	46,835,800,000	48,956,910,000	64,132,720,000	62,688,360,000
Gowa	54,785,160,000	69,662,598,000	80,227,530,000	78,736,700,000
Sinjai	38,021,790,000	46,854,480,000	55,315,050,000	69,738,470,000
Maros	49,906,540,000	51,205,510,000	78,426,630,000	78,334,030,000
Pangkep	46,460,490,000	78,201,060,000	72,547,490,000	84,050,220,000
Barru	42,032,280,000	43,713,440,000	50,755,420,000	65,231,920,000
Bone	89,442,570,000	88,244,460,000	86,315,710,000	97,960,110,000
Soppeng	33,832,040,000	49,276,640,000	43,719,300,000	59,314,280,000
Wajo	74,835,020,000	73,454,700,000	63,351,730,000	84,684,080,000
Sidrap	41,347,480,000	41,831,330,000	51,755,940,000	58,177,940,000
Pinrang	44,568,230,000	63,154,020,000	56,046,540,000	67,404,200,000
Enrekan	42,116,080,000	48,908,340,000	50,131,700,000	59,140,340,000
Luwu	54,806,460,000	59,690,400,000	68,010,320,000	90,972,710,000
Toraja	64,649,650,000	55,955,450,000	58,947,980,000	70,986,610,000
Luwu Utara	43,516,120,000	53,187,510,000	51,879,100,000	76,873,460,000
Luwu Timur	44,724,510,000	38,909,600,000	55,595,030,000	68,195,690,000
Toraja Utara	52,577,990,000	85,464,350,000	86,030,180,000	84,558,100,000
Makassar	32,644,320,000	40,886,000,000	64,792,920,000	31,700,180,000
Pare-Pare	50,362,700,000	45,798,230,000	32,485,350,000	41,447,990,000
Palopo	38,000,330,000	39,243,130,000	36,481,000,000	51,693,840,000

BELANJA MODAL DALAM RUPIAH				
Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Selayar	88,611,655,000	185,476,294,000	203,983,033,000	161,415,416,000
Bulukumba	102,962,252,000	139,894,351,000	199,138,760,000	319,563,919,000
Bantaeng	89,939,474,000	140,464,996,000	145,444,330,000	80,213,425,000
Jeneponto	180,331,285,000	122,420,313,000	164,569,674,000	203,546,865,000
Takalar	98,034,330,000	100,151,785,000	128,167,152,000	119,852,381,000
Gowa	141,767,846,000	231,618,697,000	337,698,932,000	292,182,872,000
Sinjai	93,124,511,000	103,920,547,000	141,031,451,000	146,518,482,000
Maros	144,502,156,000	269,019,544,000	326,574,666,000	345,771,909,000
Pangkep	153,547,875,000	200,493,815,000	251,148,553,000	325,223,133,000
Barru	80,311,350,000	98,635,525,000	132,239,116,000	154,900,002,000
Bone	222,681,932,000	202,540,700,000	203,883,720,000	210,234,144,000
Soppeng	94,913,873,000	130,218,511,000	167,284,362,000	162,222,285,000
Wajo	247,211,082,000	201,493,290,000	243,630,001,000	254,765,759,000

Sidrap	132,258,243,000	161,404,977,000	242,221,673,000	341,638,777,000
Pinrang	132,278,977,000	137,736,010,000	167,048,474,000	182,261,264,000
Enrekang	109,946,447,000	128,812,194,000	140,569,896,000	191,139,001,000
Luwu	92,211,847,000	115,115,015,000	158,759,573,000	161,069,662,000
Toraja	166,790,547,000	131,553,777,000	190,382,329,000	193,561,537,000
Luwu Utara	150,377,052,000	155,745,021,000	138,954,930,000	186,128,682,000
Luwu Timur	260,270,391,000	317,799,222,000	377,763,455,000	455,671,284,000
Toraja Utara	135,841,714,000	172,261,216,000	178,469,142,000	159,961,781,000
Makassar	333,091,925,000	321,839,389,000	521,328,029,000	697,659,475,000
Pare-Pare	115,995,571,000	132,001,245,000	123,605,380,000	137,958,233,000
Palopo	86,867,389,000	98,452,508,000	98,112,980,000	102,755,725,000

LUAS WILAYAH dalam Km2	
Kabupaten/Kota	Luas Wilayah
Selayar	903.50
Bulukumba	1,154.67
Bantaeng	395.83
Jeneponto	903.35
Takalar	566.51
Gowa	1,883.32
Sinjai	819.96
Maros	1,619.12
Pangkep	1,112.29
Barro	1,174.71
Bone	4,559.00
Soppeng	1,359.44
Wajo	2,506.20
Sidrap	1,883.25
Pinrang	1,961.17
Enrekang	1,786.01
Luwu	3,000.25
Toraja	2,054.30
Luwu Utara	7,502.68
Luwu Timur	6,944.88
Toraja Utara	1,151.47
Makassar	175.77
Pare-Pare	99.33
Palopo	247.52

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAK, Pajak, Retribusi, DAU ^b	.	Enter

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.842 ^a	.709	.696	.2417582	2.139

a. Predictors: (Constant), DAK, Pajak, Retribusi, DAU

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.956	4	3.239	55.418	.000 ^b
	Residual	5.319	91	.058		
	Total	18.275	95			

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, Pajak, Retribusi, DAU

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.025	3.190	2.202	.030		
	Pajak	.231	.028	.677	.8184	.467	2.141
	Retribusi	.096	.040	.167	2.395	.660	1.516
	DAU	-.012	.149	-.007	-.081	.936	2.533
	DAK	.466	.102	.292	4.582	.785	1.273

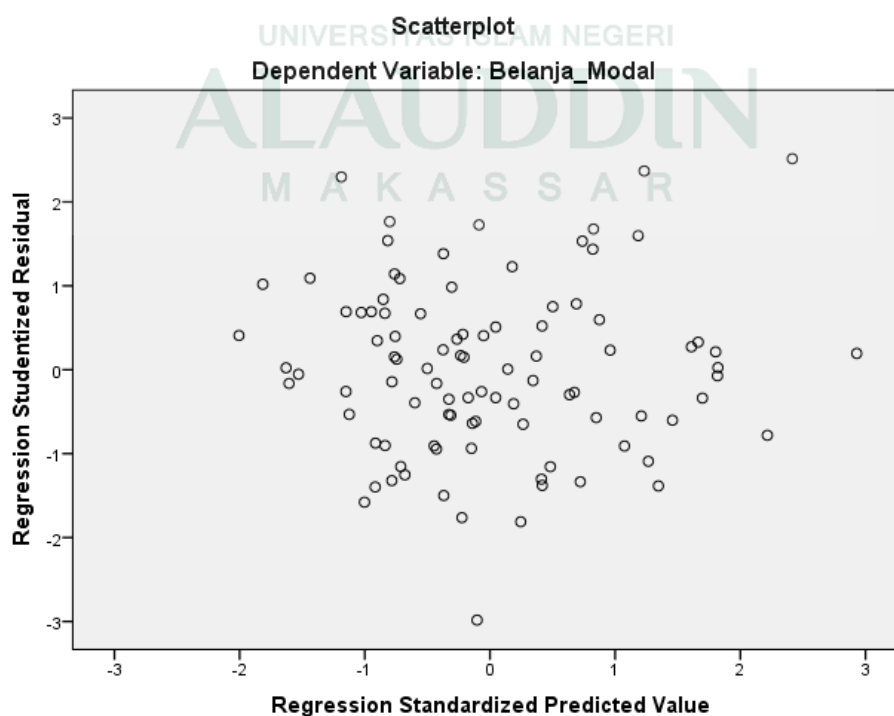
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

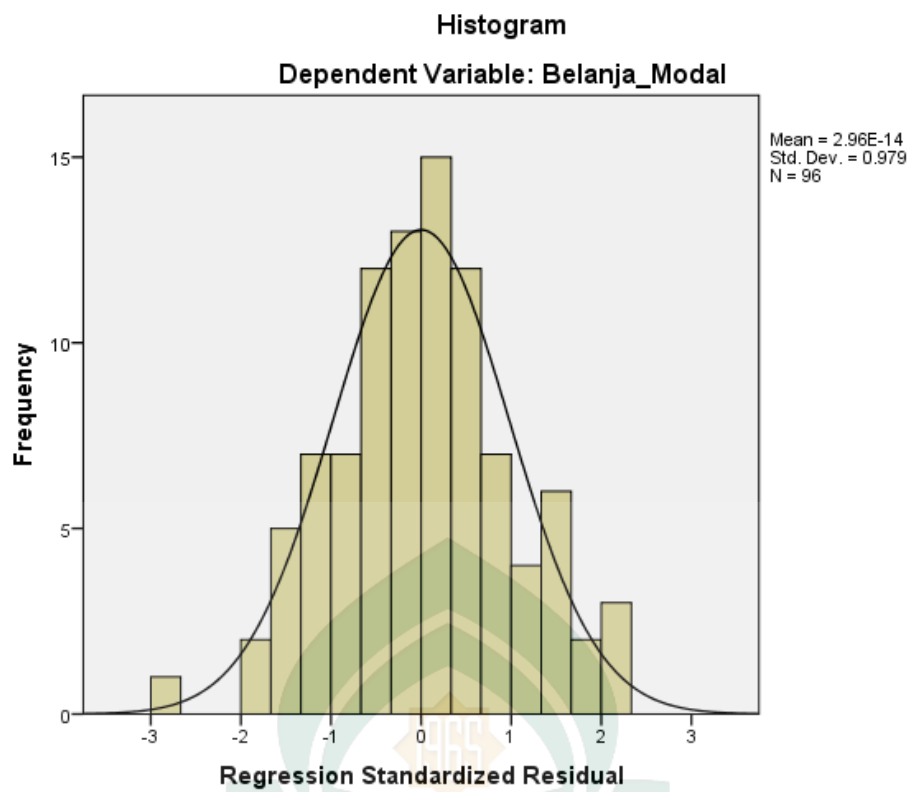
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23661381
	Absolute	.047
Most Extreme Differences	Positive	.047
	Negative	-.032
Kolmogorov-Smirnov Z		.456
Asymp. Sig. (2-tailed)		.985

a. Test distribution is Normal.

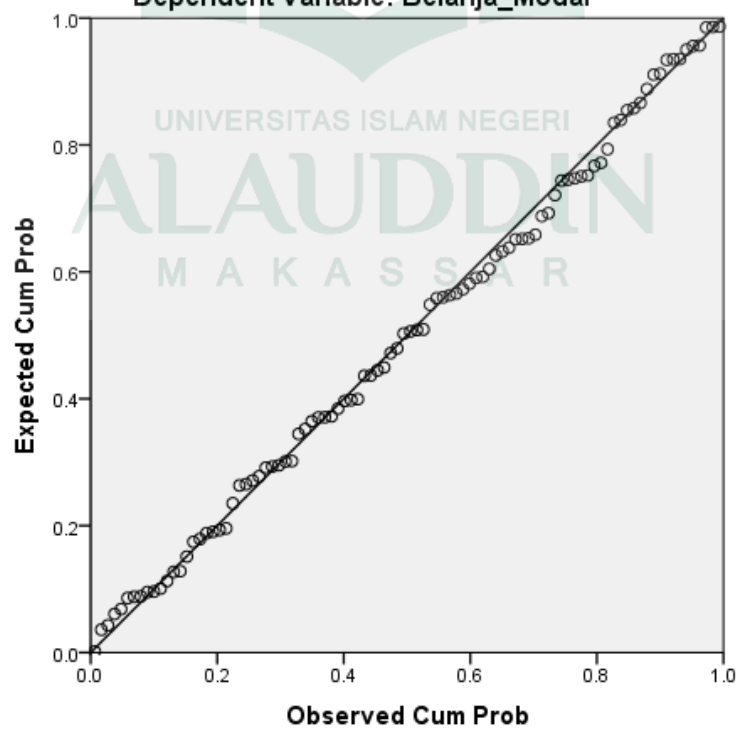
b. Calculated from data.

Charts





Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Belanja_Modal



Hasil Uji Nilai Selisih Mutlak

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	AbsX_Z, Zscore(Luas_Wilayah), Zscore(Pendapatan_D) ^b		Enter

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.771 ^a	.595	.582	.2836311	2.179

a. Predictors: (Constant), AbsX_Z, Zscore(Luas_Wilayah), Zscore(Pendapatan_D)

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10.874	3	3.625	45.055	.000 ^b
Residual	7.401	92	.080		
Total	18.275	95			

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

b. Predictors: (Constant), AbsX_Z, Zscore(Luas_Wilayah), Zscore(Pendapatan_D)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	25.794	.041		624.050	.000		
Zscore(Pendapatan_D)	.285	.034	.649	8.345	.000	.728	1.373
Zscore(Luas_Wilayah)	.095	.030	.216	3.107	.003	.914	1.094
AbsX_Z	.067	.033	.160	2.010	.047	.694	1.442

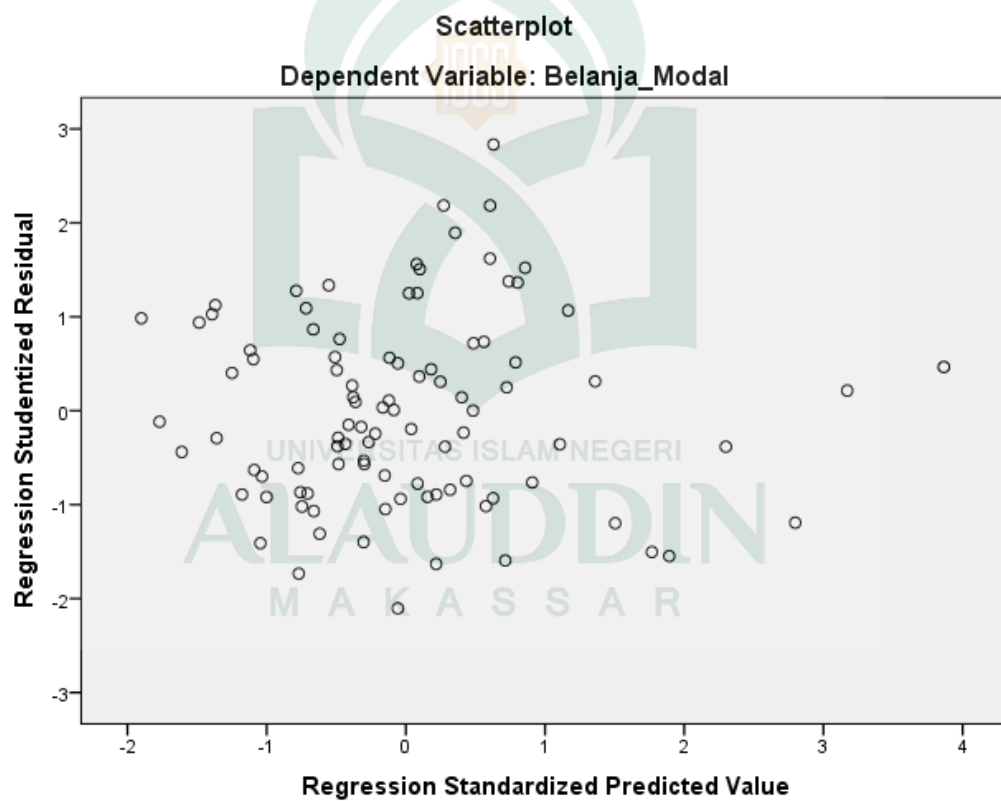
a. Dependent Variable: Belanja_Modal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

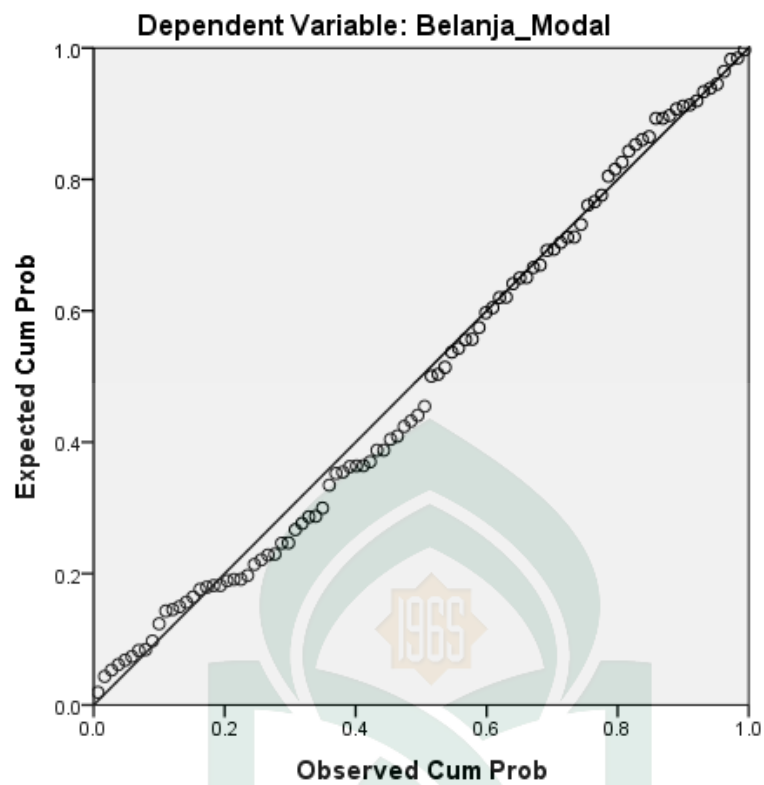
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27911681
	Absolute	.062
Most Extreme Differences	Positive	.062
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		.607
Asymp. Sig. (2-tailed)		.855

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

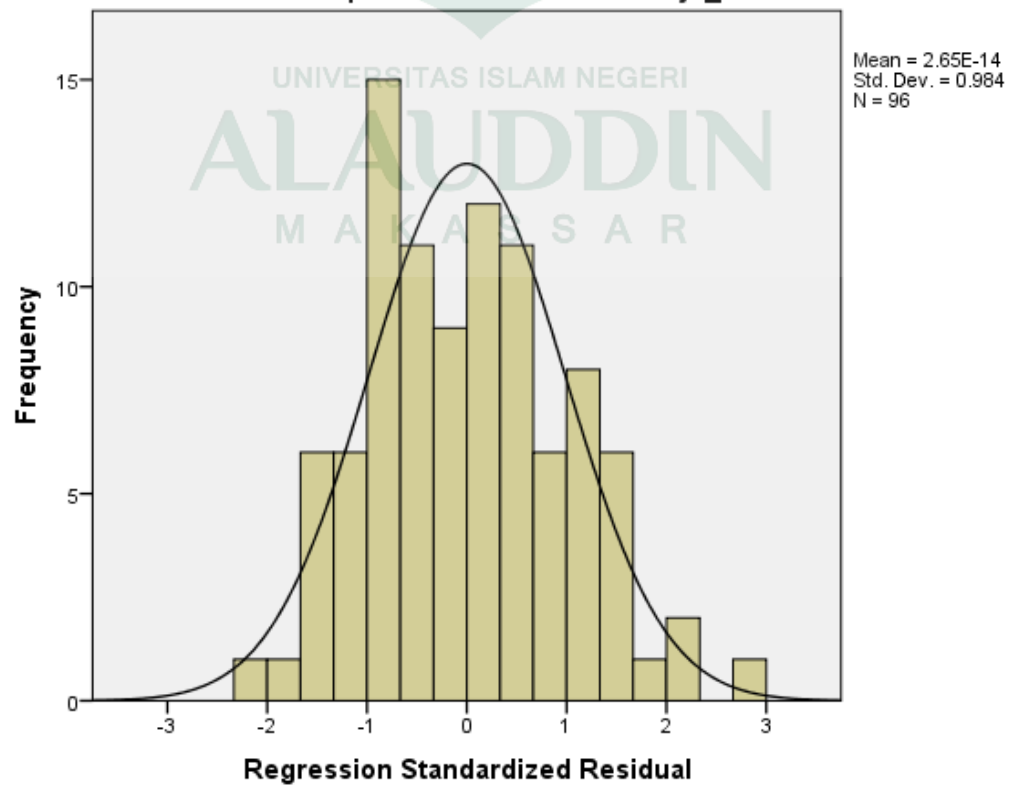


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram

Dependent Variable: Belanja_Modal





1 2 0 1 6 1 9 1 4 2 1 4 2 3 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 13864/S.01P/P2T/10/2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.

Kepala Badan Pusat Statistik Prov. Sulsel

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 3689/EB.I/PP.00.9/2016 tanggal 14 Oktober 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **A. FIRMAN HASNUR**
Nomor Pokok : 10800112039
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL DENGAN LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERTAING PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Oktober s/d 17 November 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 17 Oktober 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP BKPM 18-10-2016



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





Makassar, 18 Oktober 2016

Nomor : B-134/BPS/7300/560/10/2016
Lampiran : -
Perihal : **Bukti Pengambilan Data**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar
di-

Makassar

Sehubungan dengan surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Nomor : 13864/S.01.P/P2T/10/2016, tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 3689/EB.I/PP.00.9/2016 tanggal 14 Oktober 2016, perihal Izin Penelitian maka disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

N a m a : **A. Firman Hasnur**
NIM : 10800112039
Fakultas/Jurusan : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar

Benar telah mengambil data di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah sebagai Variabel Modertaing pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan"**.

Demikian penyampaian kami untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Kasi Diseminasi dan Layanan Statistik


Ir. Muhammad Kamil
NIP: 19680429 199401 1 001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Firman Hasnur, Lahir di Watan Soppeng Kab. Soppeng provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Mei 1994, merupakan anak sulung dari Hasanuddin dan Nurpatisa. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di SDN 191 Penrie Kec. Liliraja Kab. Soppeng lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Liliraja Kec.

Liliraja Kab. Soppeng lulus pada tahun 2009 dan selanjutnya SMA Negeri 1 Liliraja Kec. Liliraja Kab. Soppeng dan lulus tahun 2012 dan mulai tahun 2012 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.